



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.219, 2019

KEUANGAN. Penyertaan Modal Negara.  
Penambahan. Persero. PT Perkebunan Nusantara III.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, terutama di bidang penelitian, pengembangan dan penyediaan benih perkebunan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp6.156.254.841.144,00 (enam triliun seratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian untuk dipergunakan terutama di bidang penelitian, pengembangan, dan penyediaan benih perkebunan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DAN NILAI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

No	Jenis/Kategori Barang Milik Negara	Lokasi	Satuan Barang	Nilai Wajar (Rp)
Barang Milik Negara Berupa Tanah				
1	Tanah Persil Lainnya	Jln. Avros, Kelurahan Kampung	2.629 M <sup>2</sup>	Rp21.711.364.000,00
2	Tanah Persil Lainnya	Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	10.009 M <sup>2</sup>	Rp82.046.924.000,00

No	Jenis/Kategori Barang Milik Negara	Lokasi	Satuan Barang	Nilai Wajar (Rp)
3	Tanah Persil Lainnya	Jln. Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung	18.045 M <sup>2</sup>	Rp278.208.436.000,00
4	Tanah Persil Lainnya	Baru, Kecamatan Medan	3.843 M <sup>2</sup>	Rp60.121.539.000,00
5	Tanah Persil Lainnya	Maimun Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	3.945 M <sup>2</sup>	Rp61.710.840.000,00
6	Tanah Bangunan Kantor	Sumatera Utara	24.422 M <sup>2</sup>	Rp374.036.998.000,00
7	Tanah Persil Lainnya		9.846 M <sup>2</sup>	Rp153.090.536.000,00
8	Tanah Non Persil Lainnya	Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	56.000 M <sup>2</sup>	Rp11.127.581.000,00
9	Tanah Non Persil Lainnya		72.000 M <sup>2</sup>	Rp14.270.026.000,00
10	Tanah Kebun Percobaan	Desa Aek Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	3.959.700 M <sup>2</sup>	Rp125.901.323.000,00
11	Tanah Kebun Percobaan		895.600 M <sup>2</sup>	Rp119.272.533.000,00
12	Tanah Kebun Percobaan	Desa Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	2.912.000 M <sup>2</sup>	Rp40.326.228.000,00
13	Tanah Kebun Percobaan		2.303.600 M <sup>2</sup>	Rp32.698.036.000,00
No	Jenis/Kategori Barang Milik Negara	Lokasi	Satuan Barang	Nilai Wajar (Rp)

14	Tanah Percobaan	Kebun	Desa Sihiuk, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	4.124.600 M <sup>2</sup>	Rp62.216.498.000,00
15	Tanah Lainnya	Kebun	Desa Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara	53.400 M <sup>2</sup>	Rp858.539.000,00
16	Tanah Lainnya	Kebun	Desa Pagaran Julu, Kecamatan Sorkam Kanan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	405.200 M <sup>2</sup>	Rp6.036.467.000,00
17	Tanah Lainnya	Kebun	Jln. Avros, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan,	41.260 M <sup>2</sup>	Rp299.805.000,00
18	Tanah Lainnya	Kebun		187.620 M <sup>2</sup>	Rp1.292.866.000,00
19	Tanah Lainnya	Kebun		5.660 M <sup>2</sup>	Rp30.346.000,00
20	Tanah Lainnya	Kebun		92.630 M <sup>2</sup>	Rp637.642.000,00
21	Tanah yang Diperuntukan	Kosong Sudah		20.513 M <sup>2</sup>	Rp116.503.426.000,00





































































































































